

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan kemampuan, sikap, dan keterampilan untuk lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga yang diimplementasikan melalui pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Implementasi melalui kedua jalur pendidikan ini harus bersama-sama didayagunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Salah satu jalur yang ditugaskan untuk tujuan di atas adalah Pendidikan Luar Sekolah. Artinya pendidikan luar sekolah mempunyai kedudukan yang sama dengan pendidikan sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini telah menjadi komitmen nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

Sebagai jabaran dari UUSPN tersebut, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Pada PP Nomor 73 Tahun 1991 tersebut ditegaskan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya (PP No.73 Tahun 1991). Salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang diharapkan dapat ikut meningkatkan sumber daya manusia agar senantiasa dapat berkembang dan meningkat martabat dan mutu kehidupannya adalah kursus.

Dalam masa krisis ekonomi, sebagaimana yang terjadi pada masa reformasi

sekarang ini, kehadiran kursus sebagai wahana penanggulangan krisis cukup signifikan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan maraknya kasus PHK, sehingga banyak pengangguran. Padahal, jumlah pengangguran sebelum masa krisis pun telah cukup tinggi. Setelah dilanda krisis ekonomi, jumlah pengangguran bertambah dengan sangat cepat. Di Jawa Barat, berdasarkan data yang ada di Kanwil Depnaker Jawa Barat sampai akhir tahun 1998, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 1.640.253 orang; sedangkan tenaga kerja yang terkena PHK sampai akhir Maret 1998 sebesar 27.783 orang, terdiri dari laki-laki 10.838 orang dan wanita 16.945 orang; karyawan yang dirumahkan ada 5.123 orang, terdiri atas laki-laki 3.006 orang dan wanita 2.117 orang (Kanwil Depnaker Jawa Barat, 1998). Dengan maraknya kasus PHK maka semakin panjang daftar warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Secara nasional persentase warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada masa krisis ini dikatakan lebih dari 40%\*)

Para pengangguran dan penganggur korban PHK itu pada pandangan pendidikan luar sekolah memerlukan reorientasi untuk melihat lagi kemampuan dan masalah-masalah yang dihadapi sehubungan dengan dunia kerja. Selanjutnya barangkali ada bagian dan kemampuan pada dirinya yang perlu dimutakhirkan sesuai dengan tuntutan perubahan keadaan. Pemutakhiran kemampuan inilah esensi dari *recurrent education* untuk meraih kembali peluang kerja baru yang masih tersedia. Tuntutan pemutakhiran kemampuan ini pun merupakan aktualisasi dari konsep *life long learning*.

Coombs (1974) menganggap bahwa pendidikan luar sekolah yang tepat, seperti kursus, dapat dijadikan sebagai suatu alternatif selain pendidikan sekolah untuk mem-

-----

\*) Angka tentang hal ini berbeda antar berbagai sumber. Yang jelas angkanya selalu lebih dari 30% dari total populasi penduduk Indonesia yang tercatat 200 juta jiwa pada tahun 1998.

rangi kemiskinan. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan untuk melepaskan diri dari pengangguran dan kemiskinan dapat diperoleh pada lembaga kursus sebagaimana digariskan dalam PP No. 73 Tahun 1991 bahwa kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya lembaga kursus sebagai bagian dari pendidikan nasional dalam mengembangkan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. *Pertama*, kursus dapat meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sebagai tenaga kerja. Telah sangat dikenal bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia sangat jauh dari standar kualitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Keadaan ini dapat dilihat dari gambaran tentang tenaga kerja tahun 2000 menurut Biro Pusat Statistik Jawa Barat, yang menyatakan bahwa mereka yang tidak/belum pernah sekolah ada 9,01%; tidak/belum tamat SD: 25,61%; tamat SD: 46,63%; tamat SMTP umum: 8,96%; tamat SLTP kejuruan: 1,40%; tamat SMU/MA/ sederajat: 4,99%; tamat SM kejuruan: 2,66%; perguruan tinggi program Diploma I-II: 0,66%; perguruan tinggi D3 0,48%; program S1: 0,92%; dan program S2/S3 0,03% (Survei angkatan kerja daerah 2000: 235).

Pada sisi lain, Jalal (2001) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2001 sebesar 49,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, pengangguran mencapai 22,5 juta jiwa. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja setiap tahun bergerak antara 2-3 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya serap pasar kerja tidak sebanding dengan tingkat ketersediaan angkatan kerja. Oleh karena itu, lembaga kursus harus mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia yang berjiwa mandiri (*employee society*) sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja.

Lulusan jenjang pendidikan SD atau yang lebih rendah umumnya tidak memiliki keterampilan yang khusus untuk memasuki dunia kerja. Konsekuensinya, mereka akan bekerja pada sektor informal. Padahal, sektor ini tidak dapat menjamin kelangsungan hidup secara wajar. Sektor informal merupakan sektor yang dapat dipandang sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan luwes, sekalipun sektor ini tidak akan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka seperti yang diharapkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tidak ada jaminan sosial tenaga kerja, tidak ada dana pensiun, tidak ada dana kesehatan, dan tidak ada peningkatan kualitas diri.

Pengalihan sebagian tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal (yang potensial) dapat dilakukan melalui jalur pendidikan luar sekolah, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang berminat dan mampu untuk mengambil kursus/latihan keterampilan yang sederhana, murah, dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa setiap tahun semakin banyak penduduk usia sekolah setelah lulus dari SD, SLTP, dan SLTA tidak dapat melanjutkan pendidikan di dalam sistem pendidikan sekolah.

Apabila kita sudah sepakat bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, dan setiap individu itu merupakan *learning station*, maka satu-satunya sistem pendidikan yang dapat mengurangi jurang-jurang perbedaan antara penduduk yang berpendidikan dan yang tidak atau kurang berpendidikan adalah pendidikan luar sekolah (Soegianto, 1989).

*Kedua*, lembaga kursus sebagai salah satu bentuk dari pendidikan luar sekolah dapat melakukan fungsinya sebagai pelengkap atas kekurangan yang terdapat pada sistem pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah, karena berbagai keterbatasannya, tidak mampu menciptakan kesempatan bagi semua yang ingin melanjutkan pendidikan sehingga yang tidak melanjutkan tidak atau sulit untuk mengantarkan individu melakukan

mobilitas sosial ke atas atau melakukan *upward mobility*. Sistem pendidikan luar sekolah yang lebih mementingkan kompetensi daripada kridensial (ijazah, sertifikat, gelar) diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan sistem penerimaan tenaga kerja untuk penempatannya pada posisi-posisi tertentu.

*Ketiga*, lembaga kursus mampu merealisasikan keuntungan dari pendidikan sekolah. Biaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sekolah sangat mahal sehingga anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi jumlahnya sangat besar. Investasi akan kurang bermanfaat bila tidak diciptakan kesempatan belajar yang lain bagi yang meninggalkan jalur pendidikan sekolah. Dengan demikian, menciptakan kesempatan belajar demi terwujudnya prinsip *life long learning* dan situasi *learning societies* melalui jalur pendidikan luar sekolah merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam era globalisasi dewasa ini sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar.

Di kalangan Departemen Pendidikan Nasional, satuan pendidikan kursus lazim juga disebut dengan istilah Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Warga Masyarakat, dibuat akronimnya sebagai Diklusemas atau singkatannya PLSM. Secara organisatoris, penyelenggara-penyelenggara PLSM di Indonesia membentuk suatu paguyuban bernama Himpunan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah oleh Masyarakat, disingkat HP-PLSM. Jumlah penyelenggaraan dan jenis kursus Diklusemas telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II Tahun 1992 di Medan, Rizal (1992) dalam makalah tentang "Peranan Pendidikan Masyarakat dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional" menguraikan tentang perkembangan kursus di Indonesia. Dijelaskan bahwa pada tahun 1964 tercatat 3000 kursus, tahun 1976 menjadi 4644 kursus, tahun 1982 menjadi 7138 kursus, dan tahun 1986 bertambah menjadi 13.414 kursus. Lebih lanjut (Soedijarto, 1993:17) mengemu-

kakan bahwa "pada tahun 1990 kursus berkembang lebih pesat lagi sehingga menjadi 19.535 kursus." Dewasa ini terdapat lebih dari 100 jenis kursus yang terhimpun dalam 12 macam rumpun, yaitu: (1) bahasa, (2) jasa, (3) kerumahtanggaan, (4) keolahragaan, (5) kesehatan, (6) kesenian, (7) kerajinan industri, (8) teknik dan perambahan, (9) pertanian dan peternakan, (10) ilmu pengetahuan, (11) lingkungan hidup, dan (12) maritim (Rizal, 1992).

Pemerintah (c.q. DIRDIKMAS:1979), melihat bahwa pentingnya kehadiran Kursus Diklusemas adalah karena: (1) permintaan yang meningkat dari warga masyarakat untuk maju dengan jalan memperoleh pengetahuan praktis dan keterampilan fungsional; (2) kemampuan lembaga-lembaga persekolahan yang sangat terbatas untuk menjawab permintaan yang meningkat (akan pemenuhan kebutuhan pendidikan--*pen.*); dan (3) mengingat meningkatnya jumlah *drop out* sekolah dan pertumbuhan penduduk.

Sehubungan dengan situasi krisis ekonomi seperti tersebut terdahulu, maka orientasi lulusan pendidikan, jalur pendidikan sekolah ataupun jalur pendidikan luar sekolah, untuk mencari kerja atau menjadi karyawan bukanlah pilihan yang tepat. Yang perlu dikembangkan pada para warga belajar adalah orientasi berwiraswasta dan menciptakan lapangan kerja baru untuk dapat hidup mandiri. Seiring dengan tuntutan itu, idealnya lembaga kursus tidak hanya mengajarkan keterampilan yang bersifat vokasional saja, tetapi juga perlu memiliki dan mengajarkan muatan pendidikan kewiraswastaan. Dengan demikian, kursus diharapkan bisa melahirkan lulusan yang siap mandiri bekerja sebagai seorang wiraswastawan.

Mendidik orang untuk terampil sebagai wiraswastawan diperlukan kurikulum dan strategi pembelajaran yang spesifik. Kurikulum dan strategi pembelajaran itu perlu dirancang secara sistematis untuk bisa dimonitoring dan diukur tingkat keberhasilannya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran.

Pada sisi lain, kaum wanita merupakan khalayak sasaran pendidikan dan tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 1997 penduduk Indonesia berjumlah 198.675.836 jiwa. Lebih 50% dari jumlah itu terdiri atas wanita. Dengan keberadaannya yang absolut lebih besar daripada penduduk pria, wanita merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan. Pemberdayaan wanita sebagai tenaga kerja pada dasarnya bukan ingin mendominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal sehingga wanita mampu hidup mandiri untuk kelangsungan hidupnya.

Ada banyak situasi spesifik yang menyebabkan wanita perlu memiliki keterampilan dan kemampuan berwiraswasta untuk memperoleh pendapatan. Banyak peristiwa bisa disaksikan wanita bekerja keras membanting tulang untuk mencari nafkah, terutama yang disebabkan oleh alasan-alasan ekonomis. Dorongan wanita untuk bekerja karena alasan ekonomis banyak terjadi baik pada wanita yang bersuami atau yang telah bercerai dari suaminya. Pada umumnya wanita yang bertindak sebagai orang tua tunggal (*single parent*) lebih banyak yang berhasil membina anaknya menjadi "orang" daripada bila pria yang bertindak sebagai orang tua tunggal.

Pada sisi lain, lahirnya pekerja dan wiraswasta wanita sering terjadi dengan sendirinya saja, bahkan karena adanya kecelakaan (*by accident*), semisal karena ditinggal mati suaminya, dicerai dan diterlantarkan, atau sebab-sebab yang lainnya. Sampai saat ini tampaknya belum ada upaya sengaja yang dimaksudkan untuk membantu wanita agar siap sebagai pekerja dan wiraswasta. Kecuali itu, hasil penelitian yang pernah penulis lakukan tentang kewiraswastaan wanita di kalangan pengrajin bordir di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya membuktikan bahwa salah satu kendala yang dialami wanita dalam mengembangkan usaha di sana adalah karena keterbatasan



pengetahuan di bidang manajerial usaha. Studi ini ingin mengisi kebutuhan itu dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang akan dihasilkan.

Berkaitan dengan permasalahan pendidikan kewiraswastaan pada warga belajar wanita pada satuan pendidikan kursus, maka penelitian ini akan mencoba mengkaji bagaimana model kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan bagi wanita. Dengan model tersebut diharapkan dapat membangkitkan minat dan motivasi berwiraswasta keluaran lembaga kursus menjadi siap kerja, baik sebagai karyawati atau yang bekerja bebas sebagai wiraswasta dengan kompetensi sikap kewiraswastaan yang kuat. Dengan ini ingin dibangun suatu model kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan bagi warga belajar wanita pada lembaga kursus yang lebih menjamin tumbuhnya tenaga kerja yang siap kerja sebagai pewiraswasta.

## **B. Masalah Penelitian**

Pada umumnya kursus hanya mengajarkan berbagai keterampilan yang bersifat vokasional. Persoalan bagaimana menggunakan keterampilan itu di dunia kerja untuk meningkatkan pendapatan seringkali tidak menjadi perhatian. Penguasaan keterampilan saja tanpa didukung kemampuan penggunaan untuk meningkatkan pendapatan, tidak menjadikan keterampilan yang dimiliki memiliki makna yang fungsional.

Persoalan bagaimana menjadikan keterampilan yang dikuasai warga belajar sehingga menjadi fungsional dalam memperoleh dan/atau meningkatkan pendapatan merupakan fokus masalah yang dikaji dalam studi ini. Fokus itu dirumuskan dalam suatu kemas perlunya pendidikan kewiraswastaan yang menyertai setiap pendidikan keterampilan, khususnya pada lembaga kursus. Salah satu komponen yang diduga berpengaruh terhadap kecepatan lulusan kursus mendapatkan pekerjaan adalah kompetensi kewiraswastaan, di samping jenis kemampuan (keterampilan) yang dipelajarinya.

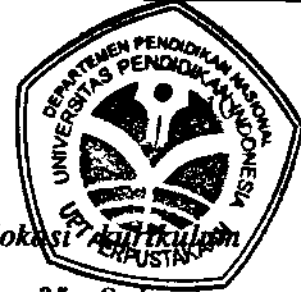


Para lulusan yang telah memiliki mental wiraswasta dan memiliki jenis keterampilan yang laku di pasar (*marketable*) akan cepat bisa mengambil keputusan dan berbuat selaku wiraswasta mandiri sebagai lapangan kerjanya. Oleh karena itu, pada sistem pembelajaran kursus dipandang perlu terdapat pembelajaran yang ditujukan untuk tumbuhnya mental wiraswasta pada para warga belajar. Dengan hadirnya mental wiraswasta, akan terjadi pergeseran orientasi dalam berburu lapangan kerja, dari yang semula berorientasi sebagai masyarakat pekerja (*worker society*), ke arah orientasi sebagai masyarakat pencipta pekerjaan (*employee society*).

Dari penelitian pendahuluan diketahui bahwa kurikulum kursus belum mengalokasikan pendidikan kewiraswastaan dan strategi pembelajaran partisipatif sebagai salah satu kompetensi yang harus dibangun pada para warga belajarnya. Selama penelitian ini dilakukan, pembelajaran pendidikan kewiraswastaan disampaikan secara insidental saja, belum terstruktur dalam sebuah subkomponen sistem kurikulum kursus secara terintegratif. Untuk itulah diperlukan upaya eksplorasi dan rekonstruksi pendidikan kewiraswastaan pada satuan pendidikan kursus. Oleh karena itu, permasalahan pertama yang ingin ditemukan jawabannya adalah "Seberapa banyak dan bagaimana alokasi materi pendidikan kewiraswastaan dalam kurikulum satuan pendidikan kursus?" Permasalahan yang kedua "Bagaimana strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan yang selama ini telah dilakukan?" Kecuali itu, perlu pula dilacak prototipe warga belajar yang dibelajarkan dengan kurikulum dan metode yang bagaimana yang dinilai paling berhasil memperoleh dan mengembangkan kewiraswastaan untuk menciptakan lapangan kerja.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pilihan masalah dan fokus penelitian, ada dua bagian besar pertanyaan umum yang ingin dicari jawabannya melalui studi empiris ini. Pertanyaan pertama



adalah *"Bagaimanakah model ideal dan layak tentang alokasi kurikulum pendidikan kewiraswastaan untuk wanita pada lembaga kursus?"*. Sedangkan pertanyaan kedua adalah *"Bagaimanakah model ideal dan layak tentang strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan untuk wanita pada lembaga kursus?"*.

Namun, sebelum bisa menjawab dua pertanyaan umum yang merupakan pertanyaan utama yang menggambarkan produk akhir penelitian, ada pertanyaan-pertanyaan antara yang harus lebih dahulu dijawab agar pertanyaan tujuan akhir itu bisa dipecahkan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul untuk mencapai tujuan penelitian utama tadi. Rumusan pertanyaan penelitian ini dipilah dalam dua golongan persoalan, yaitu (1) yang berhubungan dengan alokasi kurikulum pendidikan kewiraswastaan untuk wanita pada lembaga kursus dan (2) yang berhubungan dengan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan untuk wanita pada lembaga kursus. Jabaran dari masing-masing pertanyaan utama adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah model ideal dan layak tentang alokasi kurikulum pendidikan kewiraswastaan untuk wanita pada lembaga kursus?
  - a. Bagaimanakah gambaran situasi alamiah tujuan dan materi belajar yang dimaksudkan oleh pengelola kursus sebagai bermuatan pendidikan kewiraswastaan?
  - b. Bagaimanakah gambaran situasi alamiah yang dimaksudkan oleh warga belajar sebagai kurikulum pendidikan kewiraswastaan yang diterimanya?
  - c. Bagaimana situasi normatif tentang tujuan dan kompetensi pendidikan kewiraswastaan yang ingin dikembangkan oleh pengelola kursus dan instruktur?
  - d. Bagaimana situasi normatif tentang tujuan dan kompetensi pendidikan kewiraswastaan yang ingin dicapai oleh warga belajar?
  - e. Bagaimana model normatif tentang tujuan dan materi belajar pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus?

2. Bagaimanakah model ideal dan layak tentang strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan untuk wanita pada lembaga kursus?
  - a. Bagaimanakah gambaran situasi alamiah proses pembelajaran yang dimaksudkan oleh pengelola kursus dan instruktur sebagai strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan?
  - b. Bagaimana gambaran situasi alamiah yang dimaksud oleh warga belajar sebagai pembelajaran pendidikan kewiraswastaan yang diterimanya?
  - c. Bagaimana situasi normatif tentang strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan yang ingin dikembangkan oleh pengelola kursus dan instruktur?
  - d. Bagaimana situasi normatif tentang strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan yang ingin dijalani oleh warga belajar?
  - e. Bagaimana model normatif tentang strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus?

#### **D. Definisi Operasional**

Perlu ada klarifikasi terhadap beberapa konsep yang terkait dengan tema penelitian ini. Klarifikasi dilakukan dengan memberikan batasan yang jelas terhadap setiap istilah (kata atau frasa). Batasan itu diperlukan agar setiap konsep yang digunakan dalam penelitian ini memiliki arti yang khusus dan tidak bermakna ganda, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan pemaknaan di antara pembaca. Oleh karena itu, pemaknaan istilah yang dikembangkan di sini adalah yang terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. Beberapa konsep itu adalah sebagai berikut.

**Model** adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 662). Dalam kepentingan ini, yang dimaksud model adalah acuan kurikulum pendidikan

kewiraswastaan dan strategi pembelajaran yang dihasilkan dan merupakan produk akhir dari sebuah penelitian. Model kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan ini akan ditawarkan kepada kaum wanita peserta kursus yang telah memiliki keterampilan vokasional.

**Kurikulum.** Para pakar telah mengemukakan berbagai batasan tentang kurikulum. Menurut Nasution (1989), kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa sejumlah ahli teori kurikulum berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan, melainkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Jadi, selain kegiatan kurikuler yang formal juga kegiatan yang tidak formal, atau yang sering disebut kegiatan ekstrakurikuler. Definisi kurikulum yang lebih operasional dikemukakan oleh Hasan (1988:28) bahwa kurikulum terdiri atas empat dimensi yang saling gayut satu dengan lain yaitu: (1) kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi; (2) kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; (3) kurikulum sebagai suatu kegiatan; dan (4) kurikulum sebagai suatu hasil belajar. Kecuali itu, kurikulum dipandang sebagai interaksi antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik, sebagaimana Boyle (1981) menulis bahwa

*The term 'program' is perplexing because it is consistently used to communicate many divergent thoughts, ideas, and practices. 'Program' is often equated with 'curriculum' as used in references focusing on formal school situation. Definitions of 'curriculum' usually express the concept of structured learning opportunities to achieve specified objectives.*

Secara singkat definisi tersebut diatas dapat dimaknai bahwa "Program" selalu disamakan dengan "kurikulum" sebagaimana digunakan dalam hubungan dengan fokus

terjadi kegiatan belajar-membelajarkan (Sudjana, 2000). Jadi strategi pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah konsepsi-konsepsi teoretis, prinsip-prinsip, siasat, dan langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan oleh warga belajar dan instruktur kursus agar setiap tujuan belajar yang telah ditetapkan tentang pendidikan kewiraswastaan dapat tercapai. Dapat pula dimaknai bahwa strategi belajar adalah deskripsi tentang mengapa dan bagaimana situasi dan proses pembelajaran diatur agar tujuan belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pertanyaan 'mengapa' itu berhubungan dengan dimensi-dimensi filosofis, konseptual, atau teoretis yang melatarbelakangi maupun menjadi latar depan suatu tindakan atau langkah. Sedangkan 'bagaimana' itu menggambarkan langkah-langkah teknis yang harus atau tidak dilakukan berikut instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Dengan demikian, strategi belajar dalam penelitian ini menyangkut uraian/deskripsi tentang (1) pendekatan, (2) pengorganisasian peserta kursus, (3) pengorganisasian tujuan dan materi belajar, (4) alokasi waktu dan distribusinya, (5) dana dan pendanaan, (6) tempat belajar dan sarana pendukungnya, (7) alat dan media pembelajaran, (8) prosedur kronologis pelaksanaan pembelajaran, (9) sumber dan narasumber belajar, (10) alat evaluasi, dan (11) iklim sosial pembelajaran.

Alokasi adalah ukuran waktu yang disediakan untuk suatu kegiatan (Badudu-Zain, 1996: 38). Alokasi yang dimaksudkan di sini adalah ukuran waktu yang disediakan atau dijatahkan untuk materi belajar pendidikan kewiraswastaan beserta materi-materi pelajaran lain yang terkait dengan upaya pembangkitan motivasi berwiraswasta pada program kursus bagi para peserta kursus.

Kursus adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran secara sistematis terutama untuk tujuan-tujuan penguasaan keterampilan vokasional dan akademis. Pada satuan pendidikan berbentuk kursus, tujuan belajar, bahan belajar, instruktur, sarana-prasarana, dan alat-alat belajar disiapkan oleh pengelola kursus. Adapun

evaluasi bisa diselenggarakan oleh pengelola kursus atau pihak lain. Sedangkan warga belajar tinggal datang, memilih program belajar yang cocok dengan kebutuhannya dan melakukan kontrak belajar dengan pengelola kursus.

**Wiraswasta** adalah pengusaha swasta yang bergerak di bidang usaha (perdagangan, pengadaan jasa, perindustrian, dan sebagainya), (Badudu-Zain 1996: 1627). Wiraswasta yang dimaksud disini adalah bidang pekerjaan manusia dalam memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi yang berorientasi produksi, pelayanan jasa pada tingkat manajerial yang ditandai oleh ciri-ciri kepribadian yang memiliki nilai-nilai kemandirian, pemberani, kreatif, disiplin, ulet, bermotivasi tinggi, jujur, penuh perhitungan, dan berani mengambil risiko.

**Kewiraswastaan** adalah kajian perilaku manusia dalam fungsi ekonomi yang berorientasi produksi atau distribusi di sektor swasta dan wiraswasta yang ditandai oleh kemandirian, motivasi tinggi, kejujuran, penuh perhitungan, dan keberanian mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dengan tidak mengabaikan nilai-nilai normatif.

**Pendidikan kewiraswastaan** adalah upaya sadar bagi pembentukan kepribadian manusia untuk memiliki nilai-nilai sebagai wiraswastawan, yaitu kepribadian yang mengandung nilai-nilai mandiri, pemberani, kreatif, disiplin, ulet, bermotivasi tinggi, jujur, penuh perhitungan, dan tahu akan risiko. Dalam konsep pendidikan kewiraswastaan ini tercakup masalah-masalah nilai, konsep-konsep, sistem, lingkungan, dan iklim sosial yang ada disekitarnya.

Pada kepentingan penelitian ini, yang dimaksud pendidikan kewiraswastaan adalah pendidikan kewiraswastaan khusus yang ditujukan bagi warga belajar wanita. Apabila yang dimaksudkan adalah pendidikan kewiraswastaan pada umumnya maka akan disebut dengan frasa lengkap "pendidikan kewiraswastaan pada umumnya".

### E. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan mengembangkan sebuah model kurikulum pendidikan kewiraswastaan dan strategi pembelajarannya bagi wanita pada lembaga kursus. Dengan model tersebut diharapkan *output* pendidikan pada lembaga kursus menjadi lebih siap kerja karena telah dimilikinya jiwa wiraswasta, tidak senantiasa bersifat pasif sekedar menjadi karyawan atau pekerja yang bergantung kepada orang lain. Pada sisi lain, model ini juga bermaksud menunjukkan dan mensosialisasikan pemikiran dan konsep nilai kewiraswastaan kepada para *supporting system* pada pihak internal dan eksternal lembaga kursus.

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut dirumuskan tujuan-tujuan antara sebagai berikut.

1. Mengetahui situasi alamiah tentang tujuan dan materi belajar yang dimaksudkan oleh pengelola kursus sebagai bermuatan pendidikan kewiraswastaan.
2. Mengetahui gambaran situasi alamiah yang dimaksudkan oleh warga belajar sebagai kurikulum pendidikan kewiraswastaan yang diterimanya.
3. Mengetahui situasi normatif tentang tujuan dan kompetensi pendidikan kewiraswastaan yang ingin dikembangkan oleh pengelola kursus dan instruktur.
4. Mengetahui situasi normatif tentang tujuan dan kompetensi pendidikan kewiraswastaan yang ingin dicapai oleh warga belajar.
5. Dapat mengkonstruksikan model normatif tentang tujuan dan materi belajar pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus.
6. Mengetahui situasi alamiah proses pembelajaran yang dimaksudkan oleh pengelola kursus dan instruktur sebagai strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan.
7. Mengetahui situasi alamiah yang dimaksud oleh warga belajar sebagai pembelajaran pendidikan kewiraswastaan yang diterimanya.

8. Mengetahui situasi normatif tentang strategi pembelajaran pendidikan kewira-swastaan yang ingin dikembangkan oleh pengelola kursus dan instruktur.
9. Mengetahui situasi normatif tentang strategi pembelajaran pendidikan kewira-swastaan yang ingin dijalani oleh warga belajar.
10. Dapat mengkonstruksikan model normatif tentang strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada kursus.

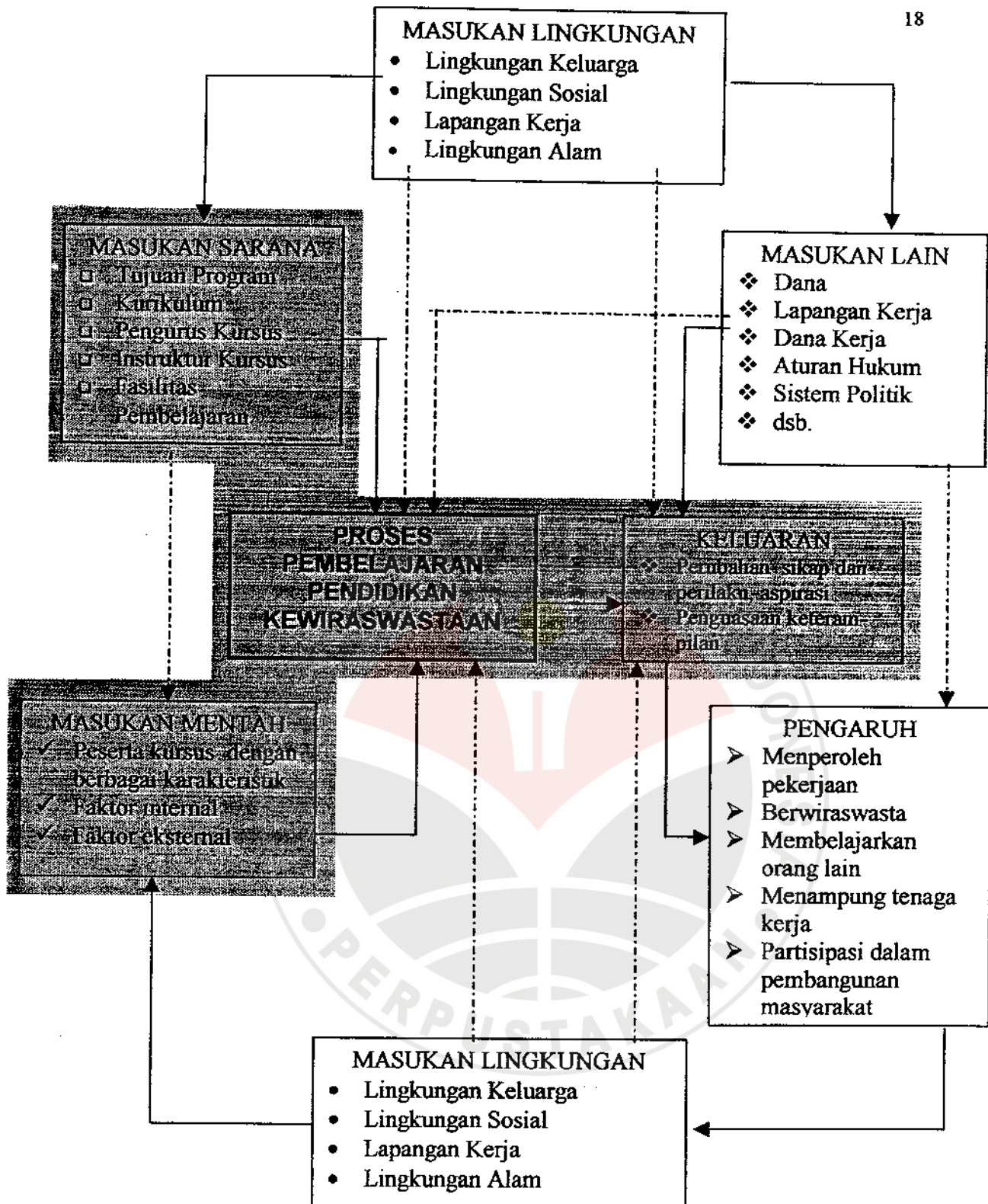
## **F. Kerangka Pemikiran**

### ***1. Cakupan Penelitian***

Kursus merupakan suatu satuan pendidikan di jalur pendidikan luar sekolah dengan karakteristik khusus, yaitu melembaganya agen penyedia layanan pendidikan (*educational providing agency*) secara relatif mantap. Ciri lain yang menonjol adalah kurikulum belajarnya semipaket dan bersifat kafetaria. Pada satuan pendidikan berbentuk kursus, biasanya lembaga penyedia layanan belajar telah menyiapkan komponen instrumental input, baik yang bersifat *hardware* maupun *software* sesuai dengan kemampuan dan jenis lembaga kursus. Misalnya saja, pada kursus menjahit, maka di sana telah disiapkan program belajar menjahit beserta prasarana, sarana, dan sumber belajarnya. Warga belajar tinggal datang untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar yang diharapkan dan yang telah tersedia di lembaga kursus tertentu. Ciri menonjol lainnya adalah materi belajar kursus bersifat fungsional dan berorientasi keterampilan (*vocational oriented*).

Dalam tinjauan komponen-komponen pendidikan luar sekolah yang meliputi masukan sarana (*instrumental input*), masukan mentah (*raw input*), masukan lingkungan (*environmental input*), proses, masukan lain (*other input*), dan pengaruh (*impact*). Komponen-komponen pembentuk kursus dapat digambarkan seperti Gambar 1.1 berikut ini.





**Gambar 1.1 Hubungan Fungsional Komponen-Komponen Pendidikan Pada Lembaga Kursus**  
(Diadopsi dari Sudjana, 2000:34)

Komponen yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah komponen masukan sarana (*instrumental input*), yaitu kurikulum kursus, khususnya tentang pendidikan kewiraswastaan, pengurus kursus, dan instruktur kursus. Komponen masukan mentah (*raw input*) adalah warga belajar dengan berbagai karakteristiknya. Komponen proses yaitu strategi pembelajaran tentang pendidikan kewiraswastaan. Setelah selesai uji coba lapangan, diperhatikan pula komponen keluaran, yaitu untuk menilai keandalan model dan perubahan perilaku warga belajar ke arah kecenderungan untuk berwiraswasta. Cakupan wilayah penelitian itu digambarkan melalui daerah yang bersir pada Gambar 1.1 tersebut di atas.

## 2. Premis Penelitian

Penelitian ini berangkat dari premis-premis sebagai berikut.

1. Kursus merupakan satuan pendidikan di jalur pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar (PP No. 73 Tahun 1991 pasal 1 [4]). Lembaga kursus adalah organisasi penyedia layanan pendidikan tertentu yang menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak bagi terselenggaranya proses belajar.
2. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi (PP No. 73 Tahun 1991 pasal 14 [1]).
3. Kursus harus memiliki sejumlah warga belajar, tenaga kependidikan, kurikulum dan alat penunjang belajar (PP No. 73 Tahun 1991 pasal 16 [1]).
4. Kurikulum merupakan suatu pedoman kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan. Kurikulum dapat

tertulis dan tidak tertulis. Kurikulum kursus sebagian besar ditentukan oleh lembaga penyelenggara kursus.

5. Di tengah situasi krisis ekonomi, di mana banyak terjadi kasus pemutusan hubungan kerja, orientasi lulusan pendidikan untuk mencari kerja atau menjadi karyawan bukanlah pilihan yang tepat. Yang perlu dikembangkan adalah orientasi berwiraswasta dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian maka kurikulum kursus perlu memiliki muatan pendidikan kewiraswastaan untuk bisa melahirkan lulusan yang siap mandiri bekerja sebagai seorang wiraswastawan
6. Mendidik orang untuk terampil sebagai wiraswastawan diperlukan kurikulum dan strategi pembelajaran yang spesifik. Kurikulum dan strategi pembelajaran itu perlu dirancang secara sistematis untuk bisa dimonitoring dan diukur tingkat keberhasilannya mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran.
7. Kaum wanita merupakan khalayak sasaran pendidikan dan tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya, yaitu lebih besar daripada penduduk pria. Agaknya perlu diberdayakan dan merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi kepentingan praktis maupun bagi kepentingan pengembangan konsep teoretis. Untuk kepentingan praktis, temuan penelitian ini sangat bermanfaat bagi pengembangan model kurikulum dan model pembelajaran pada jalur pendidikan luar sekolah umumnya, dan khususnya pada sistem satuan kursus pendidikan kewiraswastaan pada wanita. Dalam kepentingan lainnya, manfaat praktis studi ini dapat memberikan rekomendasi melalui data empiris terhadap perbaikan performansi sistem kurikulum dan strategi pembelajar-



an pada warga belajar kursus wanita. Dapat dikatakan bahwa makna sekolah sebagai suatu unit sosial bagi pendidikan formal adalah sama dengan makna kursus untuk pendidikan luar sekolah.

Manfaat praktis lainnya adalah bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan masukan pada pemegang kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah, khususnya bagi pihak Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini Direktorat Dikmas sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Diklusemas). Pemerintah, dalam hal ini khususnya pihak Depdiknas; c.q. Kabid dan Kasi Pendidikan Masyarakat Propinsi dan Kabupaten/Daerah Tingkat II, beserta instansi vertikalnya, dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai masukan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah, khususnya yang berbentuk kursus Diklusemas yang ada di wilayah kerjanya tentang pendidikan kewiraswastaan bagi warga belajar wanita. Lembaga Kursus Diklusemas dapat mengambil temuan penelitian ini sebagai masukan dalam mengembangkan dan mengelola proses pembelajaran dan pengelolaan lembaga kursus pada umumnya, dan pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada khususnya.

Dari segi normatif, penelitian ini selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dalam hal pengembangan pendidikan luar sekolah. Pengembangan dapat dirancang berdasarkan hasil kajian empirik terhadap penyelenggaraan kegiatan kursus yang ideal yang dapat membentuk hasil belajar warga belajar yang menyangkut fokus masalah penelitian ini, yaitu pendidikan kewiraswastaan bagi wanita melalui kursus.

Untuk kepentingan teoretik, temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian pendidikan luar sekolah, khususnya untuk penguatan komponen dasar kajian pendidikan luar sekolah yakni kurikulum kursus dan strategi

pembelajaran tentang pendidikan kewiraswastaan pada warga belajar wanita. Dengan demikian, diharapkan studi ini juga akan memperluas wawasan kajian komponen sistem pembelajaran pada kursus. Diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi (masukan) bagi telaah, kajian, dan pengembangan praktek pendidikan luar sekolah, khususnya pada satuan pendidikan berbentuk kursus. Dari hasil penelitian ini, diharapkan diperoleh masukan bagi pengembangan wawasan tentang pendidikan kewiraswastaan pada wanita melalui kursus.

#### H. Metode Penelitian

Keseluruhan proses penelitian ini menempuh prosedur pendekatan penelitian dan pengembangan dengan tiga tahapan utama. Tahap *pertama*, berupa studi kasus tentang kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan kewiraswastaan bagi wanita pada lembaga kursus. Pada kursus yang dijadikan objek penelitian, dikaji perihal pendidikan kewiraswastaan dan strategi pembelajaran yang diterapkan, baik secara empirik praktikal maupun normatif ideal. Tahap *kedua*, berupa pengembangan model dengan teknik *Delphi*, diskusi, dan seminar. Tahap *ketiga*, berupa uji coba model di lapangan.

Berdasarkan pertimbangan tema dan kepentingan penelitian, akhirnya terpilih empat lembaga kursus dengan jenis yang bervariasi yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Ariyanti, Lembaga Pendidikan Komputer (LPK) Padjadjaran Mandiri, Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I), dan Lembaga Pendidikan Keterampilan YAUMIN. Untuk lebih jelasnya tentang jenis kursus pada empat lembaga tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tiga lembaga pendidikan kejuruan yang disebut pertama digunakan sebagai tempat studi kasus, sedangkan satu lembaga kejuruan yang disebut terakhir digunakan sebagai tempat uji coba dan validasi model secara terbatas. Dari kasus-kasus itu akan digambarkan suatu pola pendidikan kewiraswastaan

yang mereka terapkan (empiris praktikal), dan kemudian dikembangkan suatu model normatif-ideal melalui serangkaian studi pengembangan.

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik sesuai dengan jenis dan sifat data yang dibutuhkan. Pada tahapan penelitian studi kasus, digunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Ketiga metode penggalan data itu diterapkan dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu peneliti sebagai instrumen utama. Pada tahap penelitian pengembangan dengan teknik *Delphi*, diskusi dan seminar, teknik penggalan data yang digunakan meliputi catatan atau rekaman kejadian, dokumentasi, dan wawancara/diskusi. Demikian juga pada tahap uji coba model secara terbatas, pada tahapan ini penggalan data juga menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik observasi langsung dan wawancara mendalam. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif.

